

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan akan memberikan informasi pemodal mengenai potensi suatu sekuritas dimasa yang akan datang. Kinerja keuangan dapat diukur dengan banyak indikator, salah satunya dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan (Sari , 2018). Kemudian kepemilikan publik juga mendorong terjadinya perubahan kinerja keuangan. Proporsi kepemilikan perusahaan yang lebih berpusat di satu pihak akan membuat tata kelola perusahaan lebih efisien, apabila tata kelola perusahaan lebih efisien akan membawa kinerja keuangan mencapai hasil yang lebih baik (Eforis, 2017). Kepemilikan manajerial juga mendorong terjadinya perubahan kinerja keuangan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dipegang oleh manajemen perusahaan maka manajemen cenderung lebih giat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Fitriatun et al., 2016). Selain itu dewan komisaris juga berpengaruh karena semakin besar jumlah komisaris dalam perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih sehat (Y. Rahmawati, 2017). Dewan direksi juga berpengaruh karena semakin banyak anggota dewan direksi, akan membuat *network* dengan pihak luar perusahaan akan menjadi lebih baik hal tersebut akan membuat kinerja keuangan perusahaan akan semakin

membalik (I.A. Rahmawati et al., 2017). Dengan demikian maka kinerja keuangan dipengaruhi oleh Good Corporate Governance (GCG) dengan indikator kepemilikan publik, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan dewan direksi.

Corporate Governance (CG) telah menjadi isu yang cukup menarik dan mulai menjadi perbincangan beberapa tahun belakangan ini yang diawali dengan terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang melanda Asia tidak terkecuali Indonesia. Ketika itu Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, untuk bangkit dari keterpurukan Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan pada pengelolaan perusahaan, keputusan investasi yang kurang tepat dan prinsip lemahnya penerapan GCG oleh manajemen dalam praktek bisnis. Rendahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia berdampak pada rendahnya daya saing produk dan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Good corporate governance (GCG) merupakan rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Hamka et al., (2018) menyatakan bahwa *Good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu alat yang dapat mendorong optimalnya kinerja perusahaan. Penerapan *Good corporate governance* (GCG) diperlukan, karena *Good corporate governance* (GCG) sebagai sebuah alat perlindungan hak para pemegang saham/investor. Perusahaan dapat

meningkatkan hak perlindungan investor dengan memberikan kejelasan informasi, memilih fungsi dan kemandirian manajemen yang baik, membuat peraturan mengenai kedisiplinan untuk mencegah manajemen melakukan hal yang tidak diinginkan. Lestari et al., (2020) menyatakan bahwa penerapan *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam sebuah perusahaan. Prinsip *corporate governance* dapat memberi kemajuan terhadap kinerja perusahaan, sehingga perusahaan di Indonesia dapat bertahan di tengah krisis ekonomi yang terjadi dan dapat bersaing secara global. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, Kewajaran (Sianturi, 2019).

Penerapan *Good corporate governance* (GCG) dalam pengelolaan perusahaan dikatakan penting, karena secara langsung dapat memberi arahan yang jelas bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan secara bertanggungjawab. Sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. Maulina, (2020) menyatakan bahwa pentingnya penerapan tata kelola perusahaan secara baik dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja, serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan dan mengacu pada keseimbangan keuangan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan yang sedang menuju ke arah yang lebih maju dan mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional.

Ujungnya adalah daya saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor.

Perusahaan perlu memiliki suatu sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik (*good corporate governance*), yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka yakin terhadap perolehan keuntungan dari investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi, selain itu juga dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Dari sinilah, nampak bahwa penerapan GCG sangatlah diperlukan, terutama untuk perusahaan besar yang operasionalnya tersebar di beberapa lokasi, seperti perusahaan pertambangan (Zainal, 2015).

Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang melibatkan banyak pihak. Selain dimiliki oleh perseorangan sebagai pemegang saham mayoritas juga menempatkan sahamnya di pasar (Bursa Efek). Terhadap struktur kepengurusan perusahaan ini memiliki unsur-unsur manajemen yang komplit pada berbagai bidang manajemen. Perusahaan pertambangan sendiri menjadi salah satu sektor utama yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia, sektor pertambangan menjadi pemicu pertumbuhan sektor lainya dan menyediakan kesempatan kerja 34 ribu tenaga kerja langsung.

Tahun 2001 Indonesia tercatat memiliki beberapa kasus yang melibatkan persoalan laporan keuangan seperti PT Timah (Persero) Tbk yang dituding telah memanipulasi laporan keuangannya di semester I pada tahun 2015, yang menyatakan adanya peningkatan kinerja yang positif sementara pada kenyataannya di semester I -

2015 laba operasi mengalami kerugian sebesar Rp 59 milyar (Okezone Finance, 2016). PT Timah (Persero) Tbk diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I 2015 lalu. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Ketua Ikatan Karyawan Timah (IKT), Ali Samsuri mengungkapkan, kondisi keuangan PT Timah sejak tiga tahun belakangan kurang sehat. Ketidakkampungan jajaran Direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. Jika mengacu pada kondisi nyata yang terjadi di PT Timah, Ali meyakini 4 jika laporan keuangan semester I 2015 PT Timah (Persero) Tbk fiktif. Sebab menurutnya, pada semester I 2015 laba operasi PT Timah telah mengalami kerugian sebesar Rp 59 milyar. Sehingga laporan keuangan yang menyebutkan PT Timah telah berhasil melakukan kegiatan efisiensi dan strategi yang tepat dan membuahkan kinerja positif adalah kebohongan besar (<https://www.tambang.co.id>).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada sektor pertambangan sangat diperlukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, sehingga dapat mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan perusahaan merupakan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomi perusahaan. Laporan keuangan yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat berdampak pada tidak maksimalnya tujuan yang dicapai oleh pihak pengguna laporan keuangan (Safitri; & Kamil, 2020).

Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil ekonomi yang diraih oleh perusahaan pada waktu tertentu melalui aktivitas perusahaan yang diringkas menjadi sebuah informasi dalam laporan keuangan. Dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan dan akurat, sehingga dapat membantu investor serta pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan, serta dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Nizamullah et al., (2018) menyatakan bahwa kinerja perusahaan diukur melalui indikator keuangan, informasi yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan memperlihatkan bagaimana kondisi financial perusahaan pada saat mengalami pertumbuhan atau penurunan pada kinerja keuangannya.

Kinerja keuangan disini dapat diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE). Masitoh & Hidayah, (2018) menyatakan bahwa *Return On Equity* (ROE) merupakan proxy dari kinerja keuangan, *Return On Equity* (ROE) berfungsi untuk mengukur profitabilitas perusahaan dengan menghitung laba bersih perusahaan jika dibandingkan ekuitas (aset bersih) yang dimiliki. Sedangkan menurut Novita et al., (2018) *return on equity* (ROE) adalah perolehan pengembalian dana yang diberikan kepada investor atas dana yang sudah di investasikan pada perusahaan, karena investor berperan penting dalam pemberian dan penambahan sumber dana untuk perkembangan perusahaan.

Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian tersebut antara lain: penelitian yang dilakukan oleh Saiful Amri, Andi Tri Haryono, dkk (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan Novi Syiti Masitoh, Nurul Hidayah (2018) menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Penelitian yang dilakukan Dinda Cindy Ayu Lestari, Sohib, dkk (2020) menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018.

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan atau bertentangan mengenai kepemilikan publik, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan dewan direksi terhadap kinerja keuangan menjadi menarik untuk dilakukan penelitian kembali, hal ini harapannya adalah didapatkan hasil yang baru dengan data yang baru, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang kinerja keuangan di perusahaan sektor pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE)?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE)?

3. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE)?
4. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE)?
5. Apakah Kepemilikan Publik, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan publik terhadap *Return On Equity* (ROE).
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap *Return On Equity* (ROE).
3. Untuk mengetahui pengaruh Dewan direksi terhadap *Return On Equity* (ROE).
4. Untuk mengetahui pengaruh Dewan komisaris terhadap *Return On Equity* (ROE).
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Kepemilikan Publik, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini :

1. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi mahasiswa, serta memberikan gambaran atau referensi kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian pada topik yang sama.
2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat sebagai masukan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam meneliti pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan.

